

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang menyimpan berbagai kekayaan laut yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti ikan, terumbu karang, alga dan pertambangan minyak. Dengan sumber daya laut tersebut, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan laut terbesar di dunia (Alimuddin, MR, 2004). Sebagai negara dengan laut yang luas dan tanah yang subur, Indonesia harus menjadi negara yang makmur. Tidaklah wajar jika kekayaan sebesar itu tidak menjadi kaya. Negara pelayaran Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ada 67.439 desa di Indonesia, dan sekitar 9.261 desa yang dikategorikan desa pesisir yang penduduknya digolongkan kurang mampu (Kusnadi, 2002).

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Potensi yang belum baik ini ditandai dengan kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan nasional hanya 14,7% dari total domestik bruto produk (GDP), dibandingkan dengan negara lain. Fenomena dramatis antara potensi dan pemanfaatan sumber daya laut berimplikasi pada tingkat dominan masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan di laut. Untuk melaut dengan teknologi yang sederhana juga dengan sumber daya manusia yang rendah membuat tarap hidup nelayan tradisional dapat dikategorikan miskin. Jika dibandingkan dengan pertanian lainnya. Kelompok di sektor pertanian, nelayan tradisional termasuk yang termiskin. Dengan sudah banyak program pemberdayaan pemerintah, namun belum berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ginting, dkk, 2018). Kekayaan laut yang terkandung di dalamnya seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat nelayan jika dikelola dengan baik. Namun yang terjadi, masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan laut, atau biasa disebut nelayan, yang merupakan pahlawan protein nasional, hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, membuat banyak nelayan yang ingin melaut, namun tidak memiliki kapal atau modal. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kesempatan kepada nelayan yang tidak memiliki

kapal, maka dilakukan beberapa bentuk kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dengan menggunakan sistem bagi hasil dari kapal yang mereka garap.

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam mencapai keuntungan. Oleh karena itu, kerjasama ini harus terlebih dahulu dilakukan dengan kontrak atau kesepakatan ini menunjukkan bahwa mereka secara formal, ijab dan qabul, dan bahwa kedua belah pihak telah bekerja sama secara sukarela dengan cara lain. Agar kerjasama dapat berjalan efektif, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu perjanjian atau kesepakatan kerjasama, yaitu kedewasaan dalam arti kesanggupan bertindak dan nalar, serta kemauan tanpa paksaan (Soerjono, 2007).

Menurut Antonio (2001) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem bagi hasil pada nelayan dengan pemilik kapal adalah sebagai berikut:

a. Faktor Langsung

1. Di antara faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya nelayan
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diharapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan. Keuntungan yang dihasilkan adalah keuntungan yang diperoleh nelayan saat melaut yang dibagikan antara nelayan dan pemilik kapal setelah dikurangi modal keperluan saat melaut, pekerjaan semacam ini lahir karena para pemilik kapal tidak memiliki pengalaman di laut atau memiliki kesempatan untuk mengoperasikan kapal jenis tertentu. Terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau nelayan yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis kapal tersebut, namun tidak memiliki kapal atau modal untuk ke laut. Oleh karena itu, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mendukung antara saudara, oleh karena itu, nelayan dan pemilik kapal membuat perjanjian bagi hasil.

Perjanjian pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil umumnya dilaksanakan masyarakat Gayam atas dasar kemauan bersama pemilik kapal dan nelayan dengan tujuan untuk saling membantu, dan perjanjian pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil nelayan ini biasanya dilakukan secara lisan dan saling percaya dengan sesama warga masyarakat.

Demikian juga perjanjian pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya. Adapun pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka hanya menggunakan sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hasil keuntungan yang diperoleh nelayan dari melaut dibagi sesuai kesepakatan bersama antara nelayan dengan pemilik kapal.

Masyarakat Desa Gayam pada umumnya bekerja sebagai penangkap ikan di laut, karena letak Desa Gayam terletak di pesisir pantai yang menyebabkan masyarakat sebagian besar bekerja sebagian penangkap ikan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang nelayan, sehingga banyak dari mereka

yang menggantungkan hidupnya pada laut. Kebanyakan dari mereka yang melaut penggunaan kapal sendiri untuk melaut, tidak bekerjasama dengan orang lain hanya sedikit dari pemilik kapal yang mempercayakan kapal mereka kepada orang lain atau di sebut nelayan.

Peneliti melihat ada fenomena di Desa Gayam yang sebagian besar penduduknya sebagai penangkap ikan tetapi tidak semua dari mereka melakukan kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan. Sehingga keuntungan ataupun kerugian dari pemilik kapal yang menjalankan kapalnya sendiri memperoleh keuntungan lebih banyak dan apabila mengalami kerugian di tanggung sendiri, berbeda dengan pemilik kapal yang melakukan kerjasama dengan nelayan dalam pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil yang dijalankan mereka sehingga keuntungan dari hasil melaut harus dibagi antara nelayan dengan pemilik kapal.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal. Alasan objektif saya tertarik meneliti judul ini adalah adanya kejanggalan mengenai pembagian penghasilan nelayan yang di bagi sesuai usia dan tidak di bagi sesuai kapasitasnya, karena hal demikian dapat menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan. Oleh karena itu peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut: Sistem Bagi Hasil Nelayan Dengan Pemilik Kapal (studi kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep).

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

Bagaimana pembagian keuntungan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal
Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti telah melampirkan hasil riset mengenai relasi sosial antara nelayan dengan pemilik kapal yang membentuk zona dalam rangka saling memenuhi kebutuhan. Nelayan memerlukan pemilik kapal atau yang disebut pemilik kapal sebagai pemilik modal dan penyedia alat kapal untuk bekerja. Pemilik kapal memerlukan buruh untuk membawa dan merawat kapal dan yang nantinya akan melakukan memancing.

Berikut pendapat batasan pada lingkup penelitian yakni :

1. Penelitian membahas mengenai kondisi sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik kapal dalam pemodalan dan asuransi substansial
2. Penelitian hanya membahas kondisi nelayan dengan pemilik kapal dalam relasi sistem bagi hasil.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal Di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep!

1.5 Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai kondisi nelayan dengan pemilik kapal yang melengkapi aktor tersebut. Penulisan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan baru mengenai kondisi nelayan yang harus melakukan ekspedisi ke laut selama sehari-hari.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah untuk memperkaya tambahan literasi mengenai nelayan dan relasi pemilik kapal. Data yang tertulis diusahakan untuk mempresentasikan kondisi nelayan di daerah Desa Gayam. Data hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai nelayan ataupun sistem bagi hasil yang ada di pulau Madura.